

**PERAN APOTEKER DALAM PENGGUNAAN TELEFARMASI
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN
KESEHATAN PASIEN DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI RSU SYUBANUL WATHON MAGELANG)**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Attia Zaidiah
19.C2.0040

Kepada:

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

**PERAN APOTEKER DALAM PENGGUNAAN TELEFARMASI
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN
KESEHATAN PASIEN DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI RSU SYUBANUL WATHON MAGELANG)**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Attia Zaidiah
19.C2.0040

Kepada:

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah menjadi isu permasalahan global termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan telah Pemerintah lakukan dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 dan untuk memenuhi hak atas kesehatan pasien salah satunya melalui telefarmasi. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah berupaya untuk melakukan pemenuhan hak atas kesehatan di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini membutuhkan peran Apoteker dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pelayanan ini belum dilaksanakan secara optimal, termasuk di RSUD Syubbanul Wathon, Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Apoteker di RSUD Syubbanul Wathon Magelang dalam penggunaan telefarmasi sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan pasien pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan yuridis-sosiologis (*sociology of law*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui *indepth-interview* sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Belum ada kebijakan tentang telefarmasi yang komprehensif di Indonesia. Mengingat kebutuhan pelayanan kefarmasian dan merespon keterbatasan yang ada, RSUD Syubbanul Wathon Magelang memberikan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan pasien melalui aplikasi bernama *AIDO Health* dan *website* telekonsultasi *Siloam Hospital* yang dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Pelayanan Pasien OPD Melalui Konsultasi Rawat Jalan *Online*. Peran Apoteker dalam proses pemenuhan hak atas kesehatan ini adalah melalui telefarmasi berupa pengecekan dan pelaporan berkala obat dan bahan habis pakai, konsultasi antar tenaga kesehatan dan tenaga medis, konsultasi dengan administrasi dan pengantaran obat hingga konsultasi dengan pasien terkait jenis obat, cara penggunaan hingga efek samping obat.

Diperlukan kebijakan tentang telefarmasi yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas, termasuk kesiapan baik sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan untuk mengaplikasikan *telemedicine* atau telefarmasi di Indonesia. Diperlukan pula edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan siap akan adanya layanan *telemedicine* atau telefarmasi.

Kata Kunci: peran Apoteker, telefarmasi, hak atas pelayanan kesehatan pasien, pandemi Covid-19

ABSTRACT

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has become a global issue, including in Indonesia. The government has implemented various policies to address the surge in Covid-19 cases and to fulfill patients' right to healthcare, including through telepharmacy. Through the Minister of Health's Decision Number HK.01.07/MENKES/4829/2021 regarding Guidelines for Healthcare Services through Telemedicine during the Covid-19 Pandemic, the government strives to fulfill the right to health during the Covid-19 pandemic. This policy requires the involvement of pharmacists in its implementation. However, the implementation of this healthcare system has not been optimal, including at Syubbanul Wathon Hospital in Magelang. The purpose of this study is to determine the role of pharmacists at Syubbanul Wathon Hospital in Magelang in the use of telepharmacy as an effort to fulfill patients' right to healthcare post-Covid-19 pandemic.

This research is a socio-legal study with a descriptive research specification. The primary data for this study were obtained through in-depth interviews, while the secondary data used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods were conducted through field studies and literature reviews to obtain the necessary data.

There is currently no clear comprehensive legal framework for telepharmacy in Indonesia. In response to the existing limitations, Syubbanul Wathon Hospital in Magelang takes responsibility to fulfill patients' right to healthcare through an application called AIDO Health and the Siloam Hospital teleconsultation website, as outlined in the Standard Operating Procedure (SOP) for Outpatient Department (OPD) Services Through Online Consultation. The role of pharmacists in the process of fulfilling the right to health includes periodic checks and reporting of medications and disposable materials, consultations between healthcare and medical personnel, consultations with administration, medication delivery, and consultations with patients regarding the type of medication, its usage, and potential side effects.

Clear policies on telepharmacy with strong legal enforcement are needed. Adequate readiness in terms of facilities, infrastructure, and healthcare resources is required to implement telemedicine or telepharmacy in Indonesia. Education for the public is necessary to prepare them as recipients of healthcare services for the existence of telemedicine or telepharmacy.

Keywords: role of pharmacists, telepharmacy, patients' right to healthcare, Covid-19 pandemic.